

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RETNO SUSILOWATI,SE  
Jabatan : KASUB BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHADI,ST.MM  
Jabatan : Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Selaku atasan  
Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, Januari 2025

Pihak Kedua,

**MUHADI,ST.MM**

Pembina Tk I(IV/b)

NIP. 19691029 199703 1003

Pihak Pertama,

**RETNO SUSILOWATI,SE**

Penata (III/c)

NIP. 197401122009012004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

No.	Sasaran Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
1)	Tersusunnya rencana anggaran dan program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang – undangan	Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan	1 kali
2)	Tercapainya koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan	Terlaksananya koordinasi internal dalam rangka harmonisasi kegiatan	12 kali
3)	Tersedianya bahan dan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan.	Terlaksananya penyediaan bahan dan konsep RKA, DPA, perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan	2 dokumen
4)	Tersusunnya bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) , Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK)/Penetapan Kinerja (Tapkin), dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terlaksananya penyusunan Renstra, Renja, IKU, PK dan jenis dokumen yang lainnya sesuai ketentuan	5 dokumen
5)	Menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan jenis jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Terlaksananya penyiapan bahan dan terlaksananya penyusunan LKJIP , LKPJ dan EKPD	4 dokumen
6)	Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan sekretariat dan bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.	Data usulan anggaran dari sekretariat maupun bidang	12 kali
7)	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya	Evaluasi pengajuan SPM dan SP2D	40 dokumen
8)	Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan	Evaluasi SPJ kegiatan	50 kegiatan
9)	Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya	Terlaksananya penyiapan data dan penyusunan laporan keuangan	1 kali

Purwodadi, Januari 2025

SEKERTARIS DINAS  
SOSIAL KAB.GROBOGAN

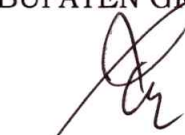


**MUHADI, ST.MM**

Pembina Tk I(IV/b)

NIP. 19691029 199703 1003

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN GROBOGAN



**RETNO SUSIOWATI, SE**

Penata (III/c)

NIP. 197401122009012004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KASUBAG UMUM KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADI ASTO RANANTO,SE,ME

Jabatan : Kepala Subbagian Umum Kepegawaian Dinas Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUHADI,ST,MM

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, Januari 2025

Pihak Kedua,

**MUHADI,ST.MM**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP.196910291997031003

Pihak Pertama,

**ADI ASTO RANANTO,SE.ME**  
Penata TK I (III/d )  
NIP.198010302009031003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DINSOS  
KABUPATEN GROBOGAN**

No.	Sasaran Kegiatan/Subkegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
		<b>Persentase layanan dukungan administrasi sekretariat yang sesuai SOP</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
a	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	100%
b	pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	Jumlah Pembayaran yang menerima gaji ASN Dinas Sosial Kab.Grobogan	100%	100%
c	dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	100%
d	ketersediaan sarana administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
e	pengadaan sarana aset penunjang administrasi perkantoran	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	100%
e.	pengadaan sarana jasa penunjang administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
g	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%
<b>2.</b>	<b>sarana dan prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar</b>	<b>Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
a	sarana dan prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	80%	80%

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Pekerjaan	Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>	5.035.875.604	10.941.242.000	DAU
a	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	30.000.000	107.150.000	DAU
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	82.150.000	DAU
a	Pekerjaan Biaya belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000	4.310.000	DAU
b	Pekerjaan Biaya belanja honor narasumber	7.200.000	400.000	DAU

c	Belanja honorarium Pengadaan Barang dan Jas		1.000.000	DAU
d	Biaya belanja Jasa Konsultani Non Kontruksi		76.440.000	DAU
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	20.000.000	25.000.000	DAU
a	Biaya belanja Alat tulis kantor		5.920.000	DAU
b	Pekerjaan Biaya belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran	9.240.000	19.080.000	DAU
c	Pekerjaan Biaya Belanja honorarium bendahara dan pengurus barang	4.800.000	13.000.000	DAU
<b>b</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.752.711.604</b>	<b>3.265.640.000</b>	DAU
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran/SKPD		6.000.000	DAU
	Belanja alat tulis kantor		6.000.000	DAU
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	2.752.711.604	3.259.640.000	DAU
a	Belanja Gaji Pokok PNS	945.338.996	1.172.516.996	DAU
b	Belanja Gaji Pokok PPPK	211.752.000	217.973.000	DAU
c	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	94.467.996	113.124.998	DAU
d	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	37.683.000	30.482.004	DAU
f	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	102.270.000	102.270.000	DAU
g	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	128.279.998	39.480.000	DAU
h	Belanja Tunjangan Fungsional umum PNS	10.360.000	18.648.000	DAU
i	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.788.000	62.567.988	DAU
j	Belanja Tunjangan Beras PPPK	23.491.000	19.719.000	DAU
k	Belanja Tunjangan PPh/TunjanganPNS	20.491.000	24.869.600	DAU
i	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan PPh khusus PPPK	3.869.000		DAU
l	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.000	15.400	DAU
m	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.000	2.140	DAU
n	Belanja iuran jamiinan kesehatan PNS	91.263.988	99.612.996	DAU
o	Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK	9.790.000	8.473.934	DAU
p	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS	1.950.020	2.157.000	DAU
q	Belanja Iuran Jaminan kecelakaan Kerja PPPK	504.000	446.988	DAU
r	Belanja iuran jaminan kematian PNS	5.875.002	6.420.960	DAU
s	Belanja iuran jaminan kematian PPPK	1.512.000	1.338.996	DAU
t	Belanja Tambahan penghasilan PNS	1.339.520.000	1.339.520.000	DAU
<b>c</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>63.022.000</b>	<b>142.500.000</b>	DAU
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63.022.000	81.000.000	DAU
a	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	DAU
b	Belanja Pakian Dinas Harian PDH	29.965.000	33.000.000	DAU
c	Belanja Pakian Barik adat daerah	13.500.000	27.500.000	DAU
d	Belanja Pakian Olah raga	18.657.000	19.468.200	DAU
e	Belanja alat tulis kantor		13.800	DAU
2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		18.000.000	DAU
a	Biaya Belanja Kursus singkat/pelatihan/bintek		18.000.000	DAU
3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan		43.500.000	DAU
a	Biaya belanja alat tulis kantor		3.180.000	DAU
b	Biaya belanja peralatan bintek		8.470.000	DAU
c	Biaya belanja narasumber		9.350.000	DAU
d	Biaya belanja honorarium pengadaan Barang dan Jasa		1.000.000	
e	Biaya belanja sewa mobilitas darat		22.500.000	DAU

<b>d</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>964.560.000</b>	<b>946.902.000</b>	DAU
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga		20.230.000	DAU
	Belanja Peralatan Listrik		20.230.000	DAU
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000		DAU
	Belanja Peralatan Listrik	15.000.000		
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor	180.460.000	230.500.000	DAU
a	Belanja Natura dan Pakan-nautar	39.600.000	17.790.000	DAU
b	Belanja Makan minum rapat	123.755.000	116.000.000	DAU
c	Belanja Makanan dan minuman aktifitas lapangan		33.150.000	DAU
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	53.176.000	DAU
	Belanja alat tulis kantor foto copy	21.055.000	32.926.000	DAU
	Belanja Pembelian spanduk	6.000.000	20.250.000	DAU
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	DAU
	Belanja Langganan koran/majalah	10.000.000	10.000.000	DAU
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan /material	125.000.000	115.000.000	DAU
a	Belanja Honorarium pengadaan Barang /jasa	1.000.000	1.000.000	DAU
b	Belanja alat tulis kantor	124.000.000	114.000.000	DAU
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	599.100.000	<b>517.996.000</b>	<b>DAU</b>
a	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	462.106.000	343.936.000	DAU
b	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.994.000	76.875.000	DAU
c	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar daerah		97.185.000	DAU
<b>e</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>254.312.885</b>	<b>5.600.516.000</b>	<b>DAU</b>
1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.877.000	100.516.000	DAU
a	Belanja honorarium pengadaan barang /jasa	2.000.000	1.000.000	DAU
b	Belanja modal mebel	36.172.100	54.611.000	DAU
c	Belanja Modal alat pendingin	12.695.400	9.594.000	DAU
d	Belanja modal alat rumah tangga lainnya	92.075.700		
e	Belanja modal pembelian komputer/laptop		39.659.000	DAU
e	Belanja modal personal komputer/printer	18.999.900	5.246.000	DAU
2	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung/ Kantor atau bangunan lainnya	110.000.000	5.5000.000.000	DAU
a	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000	2.400.000	DAU
b	Belanja Jasa Kontruksi	109.000.000	255.750.000	
c	Biaya belanja pengawasan kontruksi		244.500.000	DAU
d	Biaya belanja tim Teknis		3.000.000	DAU
<b>f</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>592.205.000</b>	<b>600.106.000</b>	<b>DAU</b>
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>		<b>4.000.000</b>	<b>DAU</b>
	<b>Biaya belanja pembelian materai</b>		<b>4.000.000</b>	<b>DAU</b>
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.677.000	<b>80.0000.0000</b>	<b>DAU</b>
a	Belanja Jasa tagihan telpon	20.000.000	<b>20.000.000</b>	<b>DAU</b>
b	Belanja Jasa tagihan air pdam	15.000.000	<b>12.600.000</b>	<b>DAU</b>
c	Belanja jasa tagihan listrik	67.187.000	47.400.000	DAU
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.168.000	41.442.000	DAU
a	Biaya belanja pemeliharaan rutin berkala ac		27.572.000	DAU
b	Biaya belanja pemeliharaan rutin berkala komputer		13.870.000	DAU

4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	425.000.000	474.664.000	DAU
a	Belanja bahan dan alat untuk kebersihan kantor	31.385.000	32.396.000	DAU
b	Belanja jasa kesehatan	7.920.000		
c	Belanja jasa tenaga administrasi	119.790.000	119.790.000	DAU
d	Belanja jasa tenaga operator komputer	59.400.000	99.585.000	DAU
e	Belanja jasa tenaga kebersihan		84.000.000	DAU
f	Belanja jasa tenaga ahli		1.400.000	DAU
g	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	73.000.000	58.400.000	DAU
h	Belanja jasa tenaga sopir	47.520.000	63.360.000	DAU
i	Belanja sewa peralatan umum		15.253.050	DAU
<b>g</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>405.500.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>DAU</b>
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>183.500.000</b>	<b>220.000.000</b>	<b>DAU</b>
a	Biaya belanja bahan bakar minyak/bbm	183.500.000	100.814.000	DAU
b	Biaya belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan		11.500.000	DAU
c	Biaya belanja pemeliharaan kendaraan dinas		107.686.300	DAU
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.000.000	80.000.000	DAU
a	Biaya belanja honorarium pengadaan barang dan Jasa	1.000.000		
b	Biaya belanja Pemeliharaan gedung kantor	221.000.000	80.000.000	
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>21.571.000</b>	<b>DAU</b>
1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam pahlawan Nasional Kab/Kota	30.000.000	21.571.000	DAU
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	30.000.000	21.571.000	DAU
	Biaya belanja pemeliharaan taman makam pahlawan	30.000.000	21.571.000	DAU
	<b>Jumlah</b>	<b>5.065.875.604</b>	<b>10.962.813.000</b>	

Grobogan, Januari 2025

**SEKRETARIS DINAS SOSIAL  
KABUPATEN GROBOGAN**



**MUHADI, ST, MM**  
Pembina TK I (IV/b )  
NIP.196910291997031003

**KEPALA SUBBAGIAN UMUM  
KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN GROBOGAN**



**ADI ASTO RANANTO, SE, ME**  
Penata TK I (III/d )  
NIP.198010302009021003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT FUNGSIONAL DINAS SOSIAL  
KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ALISTI DWI POERWATI,S.E

Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PRIYO DWIYANTO,S.E,MM

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, Januari 2025

Pihak Kedua,

**PRIYO DWIYANTO,S.E,MM**  
Pembina /IV a  
NIP 19690216 199203 1 005

Pihak Pertama,

**ALISTI DWI POERWATI,S.E**  
Penata Tingkat I / III d  
NIP 19680310 198903 2 007

**PEJABAT FUNGSIONAL DINAS SOSIAL  
KABUPATEN GROBOGAN**


No.	Sasaran Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>			
a.	Pengembangan Potensi Sumber	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga	100%	100%
1).	Jumlah orang mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten .		100 %	100%
	Butir-butir Kegiatan:			
a).	Belanja Hibah uang kepada Badan dan Nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan		100%	100%
2).	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga		
	Butir-butir Kegiatan:			
a).	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		100%	100%
b).	Presentase Peningkatan Kapasitas PSKS		95,83%	95,83%
c).	Jumlah Lembaga Kesejahteran Sosial yg tertangani			
3)	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	Persentase Fakir Miskin yang diperdayakan	99,97 %	100%
a	Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan Daerah	Persentase yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,97%	100%
b.	Presentase Fakir Miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial		99,70%	99,70%
c.	Presentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosialis.		16,55%	30%
d.	Jumlah Fakir miskin cakupan kabupaten/kota yang di data		-42,77%	-30%

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Pekerjaan	Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	110.930.000	205.000.000	DAU
a	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota</b>	110.930.000	165.000.000	DAU
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	61.170.000		DAU
a	Biaya belanja Alat tulis kantor	700.000		DAU
b	Belanja makan minum rapat	40.930.000		DAU
c	Belanja jasa reklame, film dan pemotretan	4.000.000		
d	Belanja sewa mebel	2.200.000		DAU
e	Belanja sewa peralatan umum	13.340.000		
f	Belanja hibah uang kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat social kemasyarakatan		165.000.000	DAU
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	49.760.000	40.000.000	DAU
a	Pekerjaan Biaya belanja Alat Tulis Kantor	1.704.000	2.642.000	DAU
b	Belanja makan minum rapat	18.656.000		

c	Pekerjaan Biaya belanja honor narasumber	3.000.000	1.800.000	DAU
d	Biaya belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan	2.000.000	528.000	DAU
f	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang		8.840.000	DAU
e	Biaya belanja perjalanan dinas biasa	26.400.000	26.190.000	DAU
<b>2</b>	<b>Program Perlindungan Jaminan Sosial</b>	<b>7.644.071.000</b>		<b>DAU</b>
a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	7.644.071.000		DAU
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	173.625.000	150.000.000	DAU
a	Belanja alat tulis kantor	4.345.700	7.300.000	DAU
b	Belanja kertas	1.258.500		DAU
c	Belanja bahan komputer	4.670.800		DAU
d	Belanja tenaga administrasi pengelola data fakir miskin	163.350.000		DAU
e	Belanja honorarium narasumber		51.200.000	DAU
f	Belanja sosialisasi		45.000.000	DAU
g	Biaya belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota		91.500.000	DAU
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7.470.446.000		DAU
a	Belanja alat tulis kantor	21.022.4000		DAU
b	Belanja pembelian kertas	6.292.500		DAU
c	Belanja bahan komputer	8.355.400		DAU
d	Belanja makanan dan minum rapat	25.440.000		DAU
e	Belanja honorarium narasumber dan honor tim kegiatan	102.500.000		DAU
f	Belanja spanduk	1.600.000		DAU
g	Belanja paket pengiriman penyaluran blt	84.000.000		DAU
h	Belanja perjalanan dinas	94.500.000		DAU
i	Belanja Bantuan social uang blt	7.200.000.000		
		<b>7.755.001.000</b>	<b>35.000.000</b>	

Purwodadi, Januari 2025

**KEPALA BIDANG  
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN  
FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN GROBOGAN**

  
**PRIYO DWIYANTO, S.E, MM**  
Pembina /IV a  
NIP 19690216 199203 1 005

**PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA  
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN  
FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN GROBOGAN**

  
**ALISTI DWI POERWATI, S.E**  
Penata Tingkat I / IIIId  
NIP 19680310 198903 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA  
TUGAS TAMBAHAN SUBKOORDINATOR REHABILITASI  
SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG  
BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YULI HERAWATI, S.KM, MM.  
Jabatan Fungsional : Administrator Kesehatan Ahli Muda  
Tugas Tambahan : Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan  
Perdagangan Orang Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas  
Sosial Kabupaten Grobogan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERU WIDODO NUR ARIFIN, SE.  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial  
Kabupaten Grobogan  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, Januari 2025

Pihak Kedua,

**HERU WIDODO NUR ARIFIN, SE.**

Penata Tk.I ( III/d )

NIP. 19810910 200902 1 008

Pihak Pertama,

**YULI HERAWATI, S.KM, MM.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19680713 198803 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**PEJABAT FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA**  
**TUGAS TAMBAHAN SUBKOORDINATOR REHABILITASI**  
**SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG**  
**BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIALKABUPATEN GROBOGAN**

No	SasaranProgram/Kegiatan/Sub kegiatan/Kelompok Belanja	IndikatorKinerja	CapaianTahun 2024	Target Tahun 2025
1.	<b>PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di Luar Panti</b>	<b>Persentase PPKS di LuarPantiyangmendapatkanpelayanarehabilitasisosial</b>	56%	58%
a.	<b>PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (di dalam rumah singgah)</b>	<b>1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti yang terlayani</b>	100%	100%
		<b>2. Persentase anak terlantar diluar panti yang terlayani.</b>		
		<b>3. Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang terlayani.</b>		
		<b>4. Persentase gelandangan, pengemis diluar panti yang terlayani</b>		
1)	orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gisi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	900	2200 orang
#	Kelompok Belanja Kebutuhan Natura Keg. PGOT		-	
#	Kelompok Belanja Makanan Keg. PGOT		-	
#	Kelompok Belanja Air Minum Keg. PGOT		-	
2)	orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten /kota	200	500 orang
#	Kelompok Belanja Kebutuhan lainnya untuk PGOT		-	
#	Kelompok Belanja Pakaian untuk persediaan PGOT		-	
3)	Peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten?kota	-	
#	Kelompok Belanja BBM untuk penjemputan dan mengantar PGOT		-	
#	Kelompok Belanja Kegiatan Razia PGOT		5 Kali	4 kali
#	Kelompok Belanja Honorarium Tim Pelaksanaan untuk kegiatan Tim Razia PGOT		20 orang	22 orang
b.	<b>PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar di Luar Panti</b>	<b>Persentase PPKS LainnyaBukanKorban HIV / AIDS dan NAPZA yangterpenuhikebutuhandasarnya di LuarPanti</b>	7,86%	-
1)	Makanan yang disediakan bagi kelompok sasaran Non SPM di Rumah Singgah	Jumlah paket makanan yang disediakan bagi kelompok sasaran Non SPM di Rumah Singgah	-	-
#	Kelompok Belanja Penyediaan permakanan dan sandang Rumah Singgah (Shelter)		12 bulan	-
2)	Kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang dilakukan kepada PPKS	Jumlah kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang dilakukan kepada PPKS	6 kegiatan	-
#	Kelompok Belanja Pelatihan Ketrampilan Wanita Tunan Sosial (WTS)		-	-
#	Kelompok Belanja Penjaringan Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT)		170 org	-

NO	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Kelompok Belanja	Anggaran (Rp)		KET
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Program Penanganan Warga negara migran korban tindak kekerasan		4.841.000	
a	Kegiatan Pemulangan Warga migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa /kelurahan asal		4.841.000	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan warga migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi daerah kabupaten /kota untuk dipulangkan k		4.841.000	
a	Belanja untuk pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan		4.481.000	
1.	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>222.382.900</b>	<b>222.382.900</b>	
a.	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>222.382.900</b>	<b>212.844.000</b>	DAU
1)	<b>Subkegiatan Penyediaan Permakanan</b>	<b>72.554.000</b>	<b>96.144.000</b>	
#	Kelompok Belanja Kebutuhan Natura Keg. PGOT	2.454.000	14.972.000	
#	Kelompok Belanja Makanan Keg. PGOT	68.400.000	80.212.000	
#	Kelompok Belanja Air Minum Keg. PGOT	1.700.000	960.000	
2)	<b>Subkegiatan Penyediaan Sandang</b>	<b>57.000.000</b>	<b>54.492.000</b>	
#	Kelompok Belanja Kebutuhan lainnya untuk PGOT (Shelter)	28.000.000	23.317.000	
#	Kelompok Belanja Pakaian untuk persediaan PGOT (Shelter)	29.000.000	31.175.000	
3)	<b>Subkegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar , lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</b>	<b>92.828.900</b>	<b>62.208.000</b>	
#	Kelompok Belanja BBM untuk penjemputan dan mengantar PGOT	3.438.900	-	
#	Kelompok Belanja Kegiatan Razia PGOT	35.890.000	13.408.000	
#	Kelompok Belanja Honorarium Tim Pelaksanaan untuk kegiatan Tim Razia PGOT	53.500.000	<b>48.800.000</b>	
b.	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>		-	DAU
1)	<b>Subkegiatan Penyediaan Permakanan</b>			
#	Kelompok Belanja Penyediaan permakanan dan sandang Rumah Singgah (Shelter)			
2)	<b>Subkegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</b>		-	
<b>Jumlah</b>		<b>222.382.900</b>	<b>217.685.000</b>	

Purwodadi, Januari 2025

KEPALA BIDANG REHABSOS  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN GROBOGAN

**HERU WIDODO NUR ARIFIN, SE.**

PenataTk.I ( III/d )  
NIP. 19810910 200902 1 008

SUBKOORDINATOR REHABILITASI  
SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN  
ORANG BIDANG REHABILITASI SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

**YULI HERAWATI, S.KM, MM.**

Pembina (IV/a)  
NIP. 19680713 198803 2 003